



## 1 PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan persaingan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin meningkat, persaingan terjadi tidak hanya antar perguruan tinggi Indonesia bahkan dengan perguruan tinggi di seluruh penjuru dunia. Dalam bidang teknologi informasi, adanya kemudahan akses informasi tentang perguruan tinggi dari seluruh penjuru dunia menyebabkan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 90 pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi perguruan tinggi lembaga negara lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Persaingan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif, mengharuskan penyelenggara pendidikan tinggi senantiasa memberikan layanan-layanan berkualitas sebagai kunci dalam rangka menjaga eksistensinya serta memenangkan persaingan yang salah satunya dalam layanan pendidikan. Penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas tentu tidak dapat lepas dari ketersediaan dana yang merupakan komponen penting dalam rangka menjamin terlaksananya aktivitas-aktivitas layanan pendidikan.

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian di Indonesia. Mandat tersebut dicanangkan oleh Presiden Pertama RI ketika meletakkan batu pertama pembangunan Kampus IPB pada tahun 1954. Status hukum pendirian IPB ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tanggal 1 September 1963. IPB memiliki 9 Fakultas yaitu 1) Fakultas Pertanian, 2) Fakultas Kedokteran, 3) Fakultas Perikanan, 4) Fakultas Peternakan, 5) Fakultas Kehutanan, 6) Fakultas Teknologi Pertanian, 7) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 8) Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan 9) Fakultas Ekologi Manusia dengan 39 departemen

IPB berstatus sebagai PTN Badan Hukum dan melaksanakan sistem pendanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum. Dalam PP tersebut, yang dimaksud dengan pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Sumber pendanaan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum antara lain berasal dari 1) Pemerintah dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja Negara, 2) masyarakat, 3) biaya pendidikan, 4) pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum, 5) kerja sama Tridharma, 6) pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi, 7) sumber lain yang sah.

Biaya pendidikan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi PTN Badan Hukum menjadi salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (Supriadi 2003).



Harsono (2007) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan meliputi 1) biaya satuan pendidikan, 2) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, 3) biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri atas 1) biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan, 2) biaya operasi, yang terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia, 3) bantuan biaya pendidikan, 4) beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: a) biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan, b) biaya operasi, yang terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.

IPB membangun tiga sistem pendanaan (*funding system*) untuk mendukung program pengembangannya secara seimbang yaitu: 1) pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi (*operational fund*) yang terdiri dari dana masyarakat (SPP, Non-SPP, *auxiliary enterprise*, hasil dari *fund management* dan kerjasama) dan APBN, 2) pendanaan untuk penyelenggaraan ventures (*enterprise fund*) dan 3) dana abadi (*endowment fund*) (Renstra IPB 2014-2018).

Berdasarkan Laporan Keuangan IPB yang telah diaudit, SPP merupakan sumber pendanaan terbesar kedua dalam sistem pendanaan di IPB, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 :

Tabel 1 Komposisi pendapatan IPB

Jenis Pendapatan	Tahun 2010 (Rp)	%	Tahun 2011 (Rp)	%	Tahun 2012 (Rp)	%
SPP	176.075.991.553	28	191.772.474.973	25	193.013.960.132	25
Non SPP	38.656.948.000	6	57.290.995.452	7	67.908.408.765	9
Kerjasama, Penelitian, PPM	78.638.936.029	12	99.813.152.959	13	107.370.463.386	14
Usaha Komersial	3.285.000.000	1	850.000.000	0	850.000.000	0
Usaha Penunjang	12.821.813.713	2	5.502.853.905	1	10.473.288.759	1
Subsidi Pemerintah	320.951.330.201	50	412.214.503.213	53	367.666.982.618	48
Lain-lain	5.253.896.012	1	8.459.337.394	1	22.938.403.788	3
Jumlah	635.683.915.508		775.903.317.896		770.221.507.448	

Sumber : Laporan Keuangan IPB yang telah diaudit tahun 2010, 2011 dan 2012.

Berdasarkan tabel 1 terlihat dalam tiga tahun terakhir, pendapatan subsidi pemerintah masih menjadi sumber pendapatan terbesar IPB, pada tahun 2010 subsidi pemerintah berkontribusi sebesar 50% dari seluruh pendapatan IPB, pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 53%, sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 48%. SPP merupakan pendapatan terbesar kedua di IPB, pada Tahun 2010 pendapatan SPP memberikan kontribusi sebesar 28% dari seluruh pendapatan IPB, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan menjadi 25%.

Penerimaan SPP IPB terdiri dari penerimaan SPP program-program pendidikan yang diselenggarakan IPB yaitu program pascasarjana reguler, program sarjana reguler, diploma berbasis direktorat, program sarjana BUD serta manajemen bisnis. Komposisi penerimaan SPP IPB ditunjukkan pada Tabel 2 :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Tabel 2 Kontribusi pendapatan SPP IPB

Pendapatan SPP	Tahun 2010 (Rp)	%	Tahun 2011 (Rp)	%	Tahun 2012 (Rp)	%
Program Pascasarjana Reguler	49.494.050.000	28	56.843.929.875	30	47.336.073.772	25
Program Sarjana Reguler	41.494.437.038	23	51.800.238.599	27	59.701.351.808	31
Diploma	49.364.980.022	28	38.447.947.214	20	39.030.023.917	20
Program Sarjana BUD	13.248.000.000	7	16.071.340.000	8	17.458.495.007	9
Majemen Bisnis	13.498.333.033	8	16.016.748.802	8	17.820.407.304	9
Lain-lain	10.323.200.000	6	12.592.270.483	7	11.667.608.324	6
Total	177.423.000.093		191.772.474.973		193.013.960.132	

Sumber : Laporan Keuangan IPB yang telah diaudit tahun 2010, 2011 dan 2012.

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa penerimaan SPP program sarjana reguler menjadi pendapatan terbesar kedua di IPB dan mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut turut. Pada tahun 2010 penerimaan program sarjana reguler sebesar 23% dari total penerimaan SPP IPB, pada tahun 2011 meningkat menjadi 27% dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2012 yaitu menjadi 31% yang menjadi penerimaan SPP terbesar pada tahun tersebut.

SPP program sarjana IPB terdiri dari dua komponen yaitu BPMP dan BPMK. BPMP singkatan dari Biaya Pengembangan Mutu Pendidikan, biaya ini digunakan untuk peningkatan pelayanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan. Pembebanan BPMP dilakukan dengan semangat subsidi silang yaitu bervariasi nilainya tergantung kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Semakin besar pendapatan orang tua maka nilai BPMP yang dikenakan akan semakin besar pula. Demikian sebaliknya mahasiswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu dikenakan BPMP dengan nilai yang lebih kecil. BPMK singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah, biaya ini digunakan untuk terselenggaranya perkuliahan, praktikum, dan pembimbingan mahasiswa. Nilai BPMK merupakan perkalian antara harga mata kuliah per SKS dikalikan jumlah SKS per mata kuliah dengan harga mata kuliah ditentukan berdasarkan SK Rektor IPB. Nilai BPMK mahasiswa IPB sangat bervariasi nilainya karena tergantung dari jumlah SKS yang diambil dalam satu semester serta pilihan mata kuliah yang dipilih.

Mulai tahun ajaran 2013/2014 IPB memberlakukan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru S1 Reguler. Dasar Hukum pelaksanaan BKT dan UKT adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 88 dan 98.
2. Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 272/E1.1/KU/2013: kisaran tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal)
4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013: Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
5. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 305/E/T/2012: Himbauan Dirjen kepada pimpinan PTN untuk tidak menaikkan SPP pada tahun akademik 2012-2013.



6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012: Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi

Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 menyatakan BKT adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Sedangkan UKT merupakan sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dengan maksud sebagai pemberian subsidi silang kepada mahasiswa yang berasal dari kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Dengan ditetapkannya UKT, biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa menjadi tetap nilainya mulai awal sampai akhir kuliah. UKT dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan karena dengan UKT diharapkan tidak ada tarikan lain yang harus dibayar oleh mahasiswa. Pelaksanaan UKT diharapkan dapat lebih efektif karena proses pembayaran dilakukan mahasiswa hanya dilakukan satu kali dalam satu semester dengan jumlah yang tetap dari awal hingga akhir kuliah sehingga diharapkan semua biaya telah dapat direncanakan dengan baik.

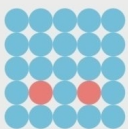
Penetapan besaran BKT dan UKT bagi masing-masing perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan perhitungan data yang ada di setiap perguruan tinggi negeri bersangkutan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. BKT dan UKT IPB tahun akademik 2013/2014 ditetapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BKT dan UKT Fakultas Teknologi Pertanian IPB tahun akademik 2014/2015 ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 BKT dan UKT Fateta tahun akademik 2014/2015

Departemen	Kelompok (Rp)							
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
TMB	1.000.000	2.400.000	4.300.000	6.200.000	8.100.000	10.050.000	12.000.000	
ITP	1.000.000	2.400.000	4.000.000	5.600.000	7.200.000	8.850.000	10.500.000	
TIN	1.000.000	2.400.000	4.000.000	5.600.000	7.200.000	8.850.000	10.500.000	
SIL	1.000.000	2.400.000	3.900.000	5.400.000	6.900.000	8.450.000	10.000.000	

Sumber :Biro Keuangan IPB

Pada Tabel 3 terlihat UKT pada keempat departemen tersebut dibagi dalam delapan kelompok. Pengelompokan UKT ditetapkan berdasarkan rentang penghasilan orang tua mahasiswa. Klasifikasi pengelompokkan rentang penghasilan orang tua mahasiswa ditunjukkan pada Tabel 4.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Tabel 4 Kelompok rentang penghasilan orang tua mahasiswa

Kelompok	Rentang penghasilan orang tua mahasiswa (Rp)
I	$P \leq 500.000$
II	$500.000 < P \leq 1.000.000$
III	$1.000.000 < P \leq 2.500.000$
IV	$2.500.000 < P \leq 5.000.000$
V	$5.000.000 < P \leq 7.500.000$
VI	$7.500.000 < P \leq 10.000.000$
VII	$10.000.000 < P \leq 15.000.000$
VIII	$P > 15.000.000$

Sumber : Laporan PPMB IPB 2014

Diperlakukannya BKT yang besaran biaya pendidikan ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu yang ditetapkan pemerintah menjadi tantangan bagi manajemen IPB untuk memiliki informasi biaya yang memadai tentang biaya penyelenggaraan pendidikan yang sesungguhnya terjadi sebagai dasar untuk mengetahui BKT yang ditetapkan pemerintah tersebut sesuai dengan biaya yang sesungguhnya terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di IPB.

Untuk dapat menetapkan besaran biaya pendidikan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, manajemen perguruan tinggi memerlukan suatu sistem pembiayaan yang dapat membantu manajemen dalam merumuskan strategi perencanaan maupun pengendalian melalui penyediaan informasi biaya yang akurat untuk memahami akurasi biaya yang ada (Krishnan 2006) karena ketersediaan informasi biaya yang akurat memiliki hubungan yang kuat dengan kesuksesan prose perubahan dalam organisasi (Banker *et al.* 2008). Sedangkan dalam sistem manajemen biaya di perguruan tinggi, hal yang menjadi tantangan adalah adanya kenyataan perguruan tinggi masih berorientasi pada pendapatan daripada orientasi biaya (Lutitsky dan Dragija 2011).

Salah satu tantangan manajemen perguruan tinggi saat ini adalah berusaha mengendalikan biaya sembari bekerja agresif untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Karenanya manajemen biaya menjadi penting sebagai penyedia informasi biaya yang berkualitas bagi perguruan tinggi yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan (Ismail 2010) yang salah satunya adalah dalam hal penetapan biaya pendidikan.

Metode *Activity Based Costing* (ABC) merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebaskan biaya sumber daya ke obyek biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk obyek biaya. Anggapan dasar dari pendekatan perhitungan biaya ini adalah produk atau jasa merupakan hasil aktivitas dan aktivitas tersebut menggunakan sumber daya yang menimbulkan biaya (Blocher *et al.* 2011). ABC merupakan model hubungan sebab akibat antara produk dan sumber daya yang digunakan dalam produksi dan menelusuri biaya produk ke aktivitas melalui penggunaan biaya driver yang sesuai (Bogdanoiu 2009). ABC dirancang untuk membenahi kekurangan-kekurangan pada sistem biaya tradisional sehingga mampu digunakan untuk mendukung pencapaian target dalam proses pembiayaan (Bengu 2010). ABC mendukung perbaikan proses berkelanjutan melalui pemberian wawasan kinerja aktivitas dengan berfokus pada sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas (Mahto dan Kumar 2013). ABC dianggap mampu menyediakan informasi biaya serta penggunaan sumber daya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

yang akurat yang dapat digunakan dalam pengambilan perencanaan dan pengendalian keputusan-keputusan (Sherrard dan McEwen 2010). Pada sektor publik, ABC dapat menjadi pilihan untuk memperbaiki efektifitas sistem perhitungan biaya tradisional serta untuk membangun tingkat akuntabilitas sebagai informasi yang dapat membantu organisasi untuk menjelaskan, menilai dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan (Messner 2009).

Penerapan ABC di perguruan tinggi mampu memperbaiki kejelasan informasi yang memungkinkan manajemen universitas untuk memahami hubungan antara biaya dan kegiatan serta mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah, membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik karena ABC mampu menghasilkan informasi biaya yang akurat, komprehensif dan detail (Newman 2003; Vazakidis *et al.* 2010; Maelah *et al.* 2011; Lima 2011; Amir *et al.* 2012). ABC dipandang fleksibel karena memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan manajemen untuk mengembangkan sistem akuntansi biaya (Manuel, 2011) di perguruan tinggi. Beberapa keuntungan penerapan ABC di perguruan tinggi antara lain memperbaiki informasi biaya, pengalokasian sumberdaya yang terbatas, pengendalian biaya yang lebih baik serta sebagai alat membangun komunikasi (Tatikonda dan Tatikonda 2001, Mansor *et al.* 2012). Selain itu penerapan ABC perguruan tinggi dapat digunakan mengukur jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap pusat biaya, konsumen, aktivitas dan proses yang mengantarkan produk sampai kepada konsumen serta sebagai dasar pengalokasian anggaran untuk fakultas, program-program maupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan (Ismail 2010; Aldukhil 2012). ABC dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan untuk memperkirakan secara akurat biaya pendidikan dengan produk dan biaya overhead yang beragam dalam rangka mencapai manajemen biaya yang efektif (Clarke dan Bellis-Jones 1996; Gupta dan Galloway 2003). Penerapan ABC di perguruan tinggi Eropa menunjukkan perbaikan kualitas dan reliabilitas laporan keuangan dan data yang signifikan dari perhitungan indikator-indikator efisiensi, pengendalian sumberdaya yang efektif, pemantauan informasi kualitatif dan kuantitatif, perbaikan manajemen keuangan (Lutinsky dan Dragija 2012) dan proses pengambilan keputusan (Chea 2011; Lotfi dan Mansourabad 2012; Yuliantanti 2010). Meskipun penggunaan ABC banyak memberikan kegunaan bagi organisasi, namun demikian masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan terkait pengembangan model ABC terutama pada perguruan tinggi negeri (Hashim 2013). Hal ini karena dalam praktek penerapannya di perguruan tinggi masih sangat sedikit dilakukan mengingat kompleksitas dari teknik ABC itu sendiri (Madjid dan Sulaiman 2008).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penetapan biaya pendidikan tinggi dengan menggunakan pendekatan *Activity Based Costing* di Institut Pertanian Bogor (IPB).

### Perumusan masalah

IPB menganut sistem akuntansi pertanggungjawaban, diantaranya pusat pertanggungjawaban biaya yaitu sebagai unit yang bertanggungjawab atas dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan operasional di unit tertentu.



Pusat pertanggungjawaban biaya di IPB terdiri dari kantor direktorat, departemen, dekanat, satuan usaha, serta unit lain yang dibentuk sebagai penanggung jawab penggunaan dana yang dialokasikan ke setiap unit tersebut. Departemen sebagai salah satu pusat pertanggungjawaban memiliki kewenangan atas penggunaan dana yang digunakan untuk keperluan operasional penyelenggaraan aktivitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan dekanat merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan penggunaan dana yang digunakan untuk kepentingan operasional manajerial di tingkat fakultas.

Selanjutnya informasi biaya dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dilaksanakan IPB dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan serta pengendalian biaya. Perencanaan biaya dilakukan dalam rangka menentukan perkiraan besaran biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Sedangkan pengendalian biaya dimaksudkan dalam rangka menjamin penggunaan sumber daya secara bijaksana dalam rangka pelaksanaan misi tridharma perguruan tinggi. Pengendalian biaya dilakukan melalui pemantauan besaran realisasi belanja pusat pertanggungjawaban agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

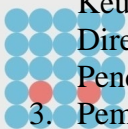
IPB memberlakukan BKT mulai tahun akademik 2013/2014, BKT yang merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri memberikan gambaran kebutuhan dana bagi perguruan tinggi negeri dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. BKT yang besarnya ditetapkan melalui perhitungan tertentu oleh pemerintah, menjadi tantangan bagi manajemen IPB untuk mengetahui biaya yang ditetapkan pemerintah tersebut telah sesuai dengan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan IPB terkait penyelenggaraan pendidikan.

Berkaitan dengan penentuan biaya pendidikan, informasi biaya yang dimiliki IPB saat ini masih berfungsi sebagai pemberi informasi tentang besaran sumber daya yang dikeluarkan. Informasi biaya IPB belum mampu memberikan informasi biaya komprehensif bagaimana sumber daya dikonsumsi oleh aktivitas-aktivitas dalam rangka menghasilkan produk jasa layanan yang diberikan IPB. Informasi biaya yang mampu menghubungkan biaya dengan aktivitas dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan strategis antara lain dalam keputusan terkait penggunaan sumber daya, perbaikan proses. Hal ini karena adanya anggapan dasar produk merupakan hasil dari aktivitas dan aktivitas tersebut menggunakan sumber daya yang menimbulkan biaya (Blocher *et al.* 2011).

Penelitian ini merupakan penerapan metode *Activity Based Costing* (ABC) untuk menentukan biaya pendidikan program sarjana IPB pada tiga departemen Fakultas Teknologi Pertanian. Berdasarkan perumusan masalah diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penentuan biaya pendidikan yang selama ini dilakukan IPB?
2. Berapakah besarnya biaya pendidikan yang dihitung dengan pendekatan ABC?
3. Apakah ada perbedaan biaya pendidikan antar departemen?
4. Apakah besaran biaya pendidikan yang ditetapkan saat ini berbeda dengan perhitungan dengan pendekatan *Activity Based Costing*?





## Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Mengidentifikasi penetapan biaya pendidikan yang dilakukan IPB saat ini.
2. Menentukan biaya pendidikan IPB dengan pendekatan ABC
3. Menguji perbedaan biaya pendidikan antar departemen
4. Membandingkan besaran biaya pendidikan IPB saat ini dengan biaya pendidikan yang dihitung dengan pendekatan ABC.

## Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Institut Pertanian Bogor
  - Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan tentang besaran biaya pendidikan Departemen.
  - Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Pembaca  
Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris tentang penerapan *Activity Based Costing* di pendidikan tinggi khususnya pada perguruan tinggi negeri dengan status badan hukum.

## Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perhitungan biaya pendidikan program sarjana reguler di tiga departemen dari empat departemen yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian IPB yaitu Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB), Ilmu dan Teknologi Pertanian (ITP) dan Teknik Sipil dan Lingkungan (SIL). Penelitian ini hanya dilakukan di tiga departemen tersebut karena tidak diperoleh ijin penilitan di Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN). Penelitian perhitungan biaya pendidikan dilakukan menggunakan pendekatan ABC dengan ruang lingkup penelitian :

1. Analisis perhitungan biaya aktivitas dilakukan di unit departemen dan fakultas, sedangkan biaya di unit rektorat diperhitungkan berdasarkan data realisasi biaya.
2. Analisis dilakukan berdasarkan data keuangan tahun 2012/2013 dari Biro Keuangan IPB serta data non keuangan yang berasal dari departemen, Direktorat Pengembangan Sarana/Prasarana dan Direktorat Administrasi Pendidikan.
3. Pembebanan biaya depresiasi diperhitungkan menggunakan rata-rata aset.